
Penataan Perkotaan di Kabupaten Gresik (Analisis RPJMD Kabupaten Gresik dengan Pelaksanaan Perpres No.59)

Muhammad Basiq El Fuadi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Basiqelfuadi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 6 Juni 2022

Accepted 6 Juli 2022

Published 6 Juli 2022

Page : 119 - 130

Keyword:

*Penataan Perkotaan;
Perencanaan;
SDG'S;*

Abstract

Developments for spatial planning in urban areas are always related to needs and consider impacts and are aware of the needs of future generations. so that the management through planning, implementation and evaluation of policies must prepare an effective and integrated strategy. through the implementation of Presidential Decree No. 59 of 2017 concerning SDG's (Sustainable Development Goals) the importance of its commitment to sustainable development, especially in Gresik Regency in urban spatial planning by strengthening efforts to protect and maintain local cultural heritage and historical cultural heritage of the past. Implementation Target, Realization of livable cities and urban areas through the development of heritage cities based on socio-cultural characters (heritage city)

Perkembangan untuk penataan ruang dalam perkotaan selalu berkaitan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan dampak serta menyadari akan kebutuhan generasi yang akan datang. sehingga dalam pengelolaan melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan harus mempersiapkan strategi yang efektif dan terintegrasi. melalui pelaksanaan Perpres No. 59 tahun 2017 tentang SDG's (Sustainable Development Goals) pentingnya atas komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Gresik dalam penataan Ruang Perkotaan dengan Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya lokal dan warisan historis kebudayaan masa lampau. Sasaran Pelaksanaan, Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (*heritage city*).

Editorial Office:

Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: jim@uinsby.ac.id

Pendahuluan

Dalam pidatonya pada KTT G20 ke-2 yang diadakan di Hamburg, Jerman pada 7 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin G20 akan pentingnya komitmennya terhadap implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Indonesia dengan serius menunjukkan komitmen yang kuat untuk menandatangani Perpres 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Presiden Jokowi secara langsung memimpin arah dari pembangunan Berkelanjutan, Yang biasa dikenal dengan *SDGs* secara resmi pada 4 Juli 2017.

Dengan berlakunya aturan Perpres ini tentang *SDGs* ini, akan segera dibentuk di bawah PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional)/Ketua Bappenas. Perpres ini mempersiapkan dan mengatur untuk Saling berkoordinasi dan membentuk komposisi tim dengan tanggung jawab Masing-masing pihak terkait. Partisipasi dari faktor selain pemerintahan dalam anggota eksekutif dan kelompok kerja dan persiapan dokumen yang harus disiapkan untuk mengukur kinerja. Mulai dari perencanaan dan pendanaan *SDGs* dari *Roadmap* dan rencana dan nantinya ke Implementasinya secara menyeluruh dari Nasional maupun turunan ke Daerah.¹

Dari sini melihat sasaran Nasional dalam RPJMN ke RPJMD kabupaten Gresik dengan acuan Tujuan Global Menjadikan Kota dan permukiman inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan dengan Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Sasaran Pelaksanaan, Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya

(*heritage city*) di kawasan perkotaan metropolitan.

Memahami hal yang paling dasar dalam kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan berakar kebutuhan yang perlu dirumuskan dalam kewenangan sesuai kapasitas dalam sistem politik, misalnya eksekutif dan legislator dengan sesuai tugas serta fungsinya bertanggungjawab atas urusan politik dan berhak memutuskan tindakan tertentu². berada sesuai batas peran regulasi dan kewenangannya. tak terelakan dengan urusan kepentingan politik dan ekonomi di kota Gresik. kebijakan publik yang diambil dalam merumuskan mengarah tujuan yang akan direncanakan, hakikat yang mendasar terdiri sesuai tindakan berkaitan bersangkutan paut yang akan dilakukan pemerintahan dalam bidang tertentu, sejalan dengan diikuti tindakan dan implementasi konkrit serta bertanggung jawab secara penuh dengan evaluasi yang transparan

Anderson³ merumuskan kebijakan publik secara pengelompokkan menjadi empat (4), pertama *Substantive and Procedural policies*. *substantive* dilihat dari kebijakan dari substansi masalah yang dihadapi pemerintahan, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak yang terlibat dalam perumusannya (pemangku kebijakan/*stakeholders*). kedua *Distributive, Redistributive, and Regulatory policies*, ketiga *Material Policy* mengatur dalam pengalokasian ataupun dalam penyediaan dari awal perumusan dan implementasi sumber material yang akan digunakan. keempat *public Goods and Private Goods Policies* mengatur penyediaan barang/pelayanan berbasis kepentingan masyarakat umum dan mengatur penyediaan barang/pelayanan mulai dari pihak swasta,

¹ Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDG's

² wahab. 2002. Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. jakarta: Bumi Aksara

³ Anderson, James E. 1970. Public Policy Making. New york : Reinhart and Wiston

kepentingan perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Mustopadidjaja AR⁴ sistem kebijakan publik adalah keseluruhan yang disusun kelembagaan dalam pembuatan perumusan kebijakan melibatkan empat unsur, pertama masalah kebijakan publik, kedua pembuatan kebijakan publik, ketiga kebijakan publik, terakhir keempat dampak terhadap sasaran implementasinya. sehingga dalam sistem kebijakan publik adanya unsur unsur input (masalah kebijakan publik), proses (pembuatan kebijakan publik), *output* (memecahkan masalah ataupun mencapai tujuan), *impact* (dampak ataupun sasaran).

Regulasi dalam siklus kebijakan publik⁵ keputusan yang mengikat bagi kepentingan masyarakat bagi kepentingan banyak orang pada tataran strategis secara garis besar dirumuskan oleh pemegang otoritas publik. keputusan yang mengikat ini mendasar dari otoritas politik terpilih yang menerima mandat dari publik dan masyarakat. selanjutnya proses regulasi kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang terpilih secara sah untuk menjalankan birokrasi pemerintahan. paling utama dalam fokus kebijakan publik adalah respon dalam pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang di atur dan dilakukan oleh pemerintahan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak sehingga capaian dalam hal ini alternatif pembangunan dengan perspektif kesejahteraan masyarakat berbasis data historis dan nilai nilai moral pendahulu serta spirit kebudayaan dan secara langsung bagian dakwah islam secara dimensi spritual.

Perencanaan membahas kajian pembentukan penataan Ruang perkotaan di Kabupaten Gresik dalam perkembangannya harusnya menyesuaikan dengan potensi dan kendala yang akan dihadapi mulai dari amdal nantinya sebagai. sehingga dalam perencanaannya manusia sebagai pemakai ruang tersebut ada keterikatan antara ruang

perkotaan dengan Masyarakatnya. bahwa dalam satu ruang perkotaan yang bagus, memiliki hubungan yang berkaitan antara ruang solid (massa bangunan) dan ruang *void* (ruang terbuka) capain ini harusnya memenuhi dasar dari perencanaan pembangunan yang ideal. apalagi dalam ruang perkotaan juga harus mempunyai strategi dan integrasi dalam pengelolaan antara kawasan satu dengan kawasan yang lainnya sehingga dalam pemanfaatan di masyarakat dapat diakses seluruhnya tanpa terpisah memberikan makna dan menjadi pusat berkumpulnya aktivitas di wilayah kota dengan beragam kegiatan masyarakat. dari sini pembangunan ruang perkotaan tidak terlepas dari kebutuhan atau upaya untuk memenuhi apa yang ada di masyarakat atau warganya.

Membahas kajian pada fokus *Morfologi* atau Kajian Pembentukan Ruang perkotaan di Kabupaten Gresik, Jawa timur melibatkan pengaruhnya dari perusahaan besar yang dianggap sebagai acuan atas sirkulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sehingga memicu industrialisasi besar besaran dan terjadinya determinasi kapitalisme industri dalam politik penataan ruang perkotaan di kabupaten Gresik. Yang puncaknya membentuk sebuah kawasan industrialisasi dengan nama daerah Kawasan Industri Gresik (KIG) yang mempengaruhi perubahan sosial dan kultural masyarakat di sekitarnya dan akhirnya menyeluruh di kota Gresik percepatan terpusat pembangunan kawasan industri di jawa timur masuk Ring 1 seperti *Surabaya Industrial Rungkut* (SIER), *Sidoarjo Industrial Estate Berbek* (SIEB), *Pasuruan Industrial Estate Rembang* (PIER), *Ngoro Industrial Park* (NIP) Mojokerto, *Kawasan Industri Gresik* (KIG). Potensi yang di janjikan di Ring 1 tersebut memang sangat besar karena memiliki infrastruktur pendukung yang memadai mulai dari jalan hingga ketersediaan pelabuhan Terminal Teluk Lamong dan Pelabuhan Perak sebagai

⁴ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR. 1988, elemen elemen sistem kebijakan publik. jakarta gunung Agung

⁵ Setiawan

mobilitas perusahaan dan percepat industrialisasi.

Membuat gambaran atas perkembangan Perkotaan Gresik, dengan adanya sentral pelabuhan kota Gresik menjadi sebuah transportasi utama beberapa abad lalu lintas perdagangan maupun penyebaran dari agama islam wilayah pesisir utara pulau jawa dengan masyarakat yang berbasis agraria dan maritim mengalami transisi industrialisasi. Kota Gresik mengalami stagnasi bahkan kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi, hingga perkembangan selanjutnya berdirinya perusahaan multi nasional industri pertama kali tahun 1953 PT Semen Gresik berdiri, setelahnya tahun 1972 PT Petrokimia Gresik sebagai momentum perubahan dalam struktur ruang dan tata kota.

Munculnya sebuah ruang Industrialisasi perkotaan terpusat di wilayah kota Gresik yang mendorong perubahan sosial yang dominan di masyarakat sebelumnya yang agraris, sehingga awalnya sangat berlawanan adanya industrialisasi ini mengalami *shockkultul* yang mengakibatkan masyarakat beralih dari agraris ke industri sampai hari ini sangat nyata. Meskipun pemetaan di bagi berbagai wilayah misalkan, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata. Tetapi perubahan sosial yang nyata adalah akibat dari industrialisasi kapital besar besaran pabrik dan perusahaan besar masuk di Kota Gresik.

Setelahnya pembuatan klarifikasi ruang industri perkotaan dengan pembagian wilayah dengan zona sesuai ukuran dan spesifikasinya. Terdiri dari Zona industri besar polutan, Zona Industri besar Non polutan, Zona industri kecil polutan, Zona industri kecil non polutan, zona pergudangan tertutup dan zona pergudangan terbuka. Analisa data atas dominasi ekonomi industri dan hegemoni kapitalisme atas Ruang kota. Ideologi pembangunan *Neoliberalisme* yang masuk secara masif

pada perubahan peta penguasaan kapital hampir terjadi di seluruh dunia hingga masuk ke Asia Tenggara begitu di Indonesia sendiri ini berdampak pada Kota Gresik yang pada tahun yang sama pertumbuhan pembangunan yang hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan surplus ekonomi dalam pembangunan kota.

Sehingga melepaskan tata kelola kota yang baik pada mekanisme pasar dan kekuatan kapital memberikan keleluasaan industri besar dalam memilih lahan di perkotaan. Tak lepas dari itu bahwa ekspansi ekonomi *kapitalisme* memang menjanjikan dan menghadirkan pembangunan serba instan semua pembangunan hanya terpusatkan di pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan *impact* atau dampak (*trickle down effect*) ataupun *shockkultur* di masyarakat yang di tuntutan mengikuti perkembangan dari pembangunan itu melihat ini juga sangat dekat dengan melihat bagaimana kepentingan politis sangat mempengaruhi arah dan kebijakan dari penataan ruang kota merujuk pada pertumbuhan ekonomi tinggi memang menjadi tren model kebijakan yang berasas pada pemenuhan kebutuhan eksistensi ekonomi semata.

Sebagai wacana besar ketika *kapitalisme* menjadi lakon dalam mengusung ide ide pertumbuhan ekonomi, deregulasi pasar, liberalisasi politik, perdagangan bebas, swastanisasi pada sektor publik sampai persaingan langsung secara nyata antara negara dan pasar dalam pelayanan publik. Sehingga determinasi kapitalisasi menjadi latar belakang berkembang sangat pesat industrialisasi di kabupaten Gresik melihat pemerintahan daerah juga sangat dekat bahkan sebagai penguasa modal ataupun memberikan keleluasaan bagi para pemodal untuk mendirikan industri-industri dari skala kecil sampai besar Meskipun pemetaan di bagi berbagai wilayah misalkan, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan

pertambahan, dan kawasan pariwisata. Tetapi perubahan sosial yang nyata adalah akibat dari industrialisasi kapital besar besaran pabrik dan perusahaan besar masuk di Kota Gresik.

Sehingga melepaskan pembangunan dan perencanaan tata kelola kota sepenuhnya pada mekanisme pasar dan kekuatan modal kapital memberikan keleluasaan industri besar dalam memilih lahan di perkotaan. Tak lepas dari itu bahwa ekspansi ekonomi kapitalisme memang menjanjikan dan menghadirkan pembangunan serba instan semua pembangunan hanya terpusatkan di pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan *impact* atau dampak (*trickle down effect*) ataupun *shockkultur* di masyarakat yang diuntut mengikuti perkembangan dari pembangunan itu melihat ini saya juga sangat dekat dengan melihat bagaimana kepentingan politis sangat mempengaruhi arah dan kebijakan dari penataan ruang kota merujuk pada pertumbuhan ekonomi tinggi memang menjadi tren model kebijakan yang berasas pada pemenuhan eksistensi ekonomi semata. Sebagai wacana besar ketika kapitalisme menjadi lakon dalam mengusung ide ide pertumbuhan ekonomi, deregulasi pasar, liberalisasi politik, perdagangan bebas, swastanisasi pada sektor publik sampai persaingan langsung secara nyata antara negara dan pasar dalam pelayanan publik. Sehingga determinasi kapitalisasi menjadi latar belakang berkembang sangat pesat industrialisasi di kabupaten Gresik melihat pemerintahan daerah juga sangat dekat bahkan sebagai penguasa modal ataupun memberikan keleluasaan bagi para pemodal untuk mendirikan industri-industri dari skala kecil sampai besar.

Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan dan pencarian data penulis, sudah ada penelitian dan tulisan yang membahas tentang kebijakan dalam penataan perkotaan di kabupaten Gresik. penulis mencoba menelaah dan melakukan

review terhadap beberapa tulisan maupun penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap persoalan yang nantinya akan menjadi objek penelitian.

1. Penulis Galang Geraldny Judul Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik, Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM Vol. 4, No. 1 tahun 2017, dalam tulisan Galang Geraldny Membahas kajian pada fokus Morfologi atau Kajian Pembentukan Ruang perkotaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang melibatkan berpengaruhnya perusahaan besar yang dianggap sebagai acuan atas sirkulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sehingga memicu industrialisasi besar besaran dan terjadinya determinasi kapitalisme industri dalam politik penataan ruang perkotaan di kabupaten Gresik. Yang puncaknya membentuk sebuah kawasan industrialisasi dengan nama daerah Kawasan Industri Gresik (KIG) yang mempengaruhi perubahan sosial dan kultural masyarakat di sekitarnya dan akhirnya menyeluruh di kota Gresik.⁶ persamaan dalam penelitian diatas yaitu membahas tentang bagaimana pembangunan tata kota di kabupaten Gresik. adapun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian yang akan penulis bahas mengenai modal kekuatan ekonomi dan politik dan regulasi kebijakan publik dalam tata pengelolaan kota di kabupaten Gresik

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam mengkaji tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan (*field reasearch*) dan kajian kepustakaan (*library researh*) yang artinya mengkaji berbagai

⁶ Galang Geraldny, Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Perkotaan di Kabupaten

Gresik, Jurnal pemikiran sosiologi UGM Vol. 4, No. 1, 2017, hal 1-17

literatur yang tidak hanya terbatas pada buku atau jurnal saja, namun dapat juga diperoleh dari koran dan bahan dokumentasi lainnya yang berasal dari perpustakaan baik secara offline maupun online. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yakni upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Artinya, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁷ Dengan metode ini, peneliti menangkap berbagai fakta yang aktual atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data yang diperoleh dari keterlibatan peneliti dalam berinteraksi dan juga hasil pengamatan, wawancara dengan Instansi Pemerintah terkait serta masyarakat, selain itu peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan dari karya tulis berupa penelitian seperti tesis, disertasi, buku, jurnal dan semua laporan penelitian.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data lapangan antara lain observasi dan wawancara. Observasi suatu cara untuk mengamati suatu kebudayaan karena penelitian ini (etnografi) adalah kegiatan yang mengumpulkan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematis. Selain itu, metode observasi mempunyai sifat natulistik yang berlangsung dari kejadian yang

kemudian menelusuri aliran ilmiah kehidupan sehari-hari.⁹ Selanjutnya, wawancara yang dilakukan tidak semua data dapat diperoleh secara observasi. Oleh karenanya, wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang dianggap paling mempresentasikan tema ini. Wawancara sangat perlu dilakukan oleh peneliti agar dapat menangkap suatu persepsi, pikiran, pendapat perasaan tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan begitu peneliti mendapatkan dan mengerti maksud yang ada di dalam pemikiran mereka, karena persepsi, perasaan, pikiran orang dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.¹⁰

Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua DPRD Gresik, Ketua BPN Gresik, Bupati Gresik, Sejarawan Gresik (stakeholder/Spektrum masyarakat Gresik)

3. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan ini, untuk mendapatkan sebuah analisis yang mendalam, informasi dan data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Setelah informasi yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti melakukan pemilahan-pemilahan sehingga benar-benar menemukan informasi yang sesuai dengan tema kajian. Analisis data merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil yang diperoleh untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek dan menyajikan temuan bagi orang lain.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik untuk lokasinya di pusat kota alun alun yang akan dibangun Gresik Kota Lama yang mengkoneksikan Islamic Centre dengan pelabuhan, kampung arab, pecinan, dan jawa dan kampung nelayan di kecamatan sidayu, sehingga memudahkan

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 26.

⁸ Ali Maksum, "Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 2012

⁹ Serdamayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 75

¹⁰ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2010), hal. 116

penulis dalam melaksanakan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan akan terfokus kepada instansi pemerintah selaku pemangku kebijakan dari stakeholder Ketua DPRD Gresik, Ketua BPN Gresik sampai Bupati Gresik sebagai tolak ukur dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan Pembangunan Berbasis Karakter Sosial Budaya (*Heritage City*)

Solusi permasalahan dalam pengelolaan perkotaan mulai dari beragam aspek mulai dari (perencanaan, Implementasi, Evaluasi pembangunan) dengan menyesuaikan dari kondisi modal sosial masyarakat Gresik dengan basis agama menjadikan kota bagian dari manajemen dakwah secara tata dan ruang kota yang menunjang. serta penguatan modal kebutuhan kelembagaan serta pembiayaan melalui eksekutif dan legislatif (pemangku kepentingan) sehingga arah pembangunan kedepan mempunyai orientasi paradigma kota di masa depan bukan hanya dimaknai mesin pembangunan nasional dan daerah (*Engine of National & Regional Growth*) tetapi mempunyai capai kota yang nyaman dan layak huni dengan arah pembangunan yang berkelanjutan dengan upaya melindungi dan menjaga warisan budaya sehingga terwujudnya kota melalui pengembangan yang berbasis karakter sosial budaya (*heritage City*) di kawasan perkotaan metropolitan.

Arah pembangunan sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDG's sesuai dengan pembangunan yang memenuhi beberapa aspek dalam pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia hari ini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia yang akan datang. poin penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah :

- a) Berkelanjutan (*sustainable*)
- b) Memenuhi kebutuhan manusia dari beberapa aspek penunjang akan kenyamanan dari hidup, fisik, sosial

budaya, dan lingkungan.

- c) Menyediakan ruang pembangunan dengan berusaha berkeadilan bagi seluruh golongan masyarakat di perkotaan
- d) Mampu mendorong dan bersaing dalam perkembangan arus modernitas hari ini dengan memanfaatkan potensi dari sosial budaya (*heritage city*) untuk capain menciptakan surplus dari perekonomian dengan basis wisata budaya dan religi yang ada di kawasan Gresik kota
- e) Terintergrasi mulai dari Kawasan islamic center alun alun dan Masjid Jami' Gresik menuju masuk ke kawasan Wisata Religi Makam Maulana Malik Ibrahim (Maulana Maghribi) dan Makam Kyai Tumenggung Puspongoro (Bupati Pertama Gresik), Makam Raden santri (Sayyid Ali Murtadlo) kakak dari Raden Rachmat (Sunan Ampel), Makam Nyai Ageng Pinatih (Ibu Angkat Sunan Giri dan Saudagar/Syah bandar pelabuhan Gresik) dari sini alternatif penataan ruang perkotaan dengan mengangkat konsep Gresik Kota Lama secara historis kaya akan peninggalan peradapan yang mapan secara religiusitas dan dari segi kosmopolitan masyarakat waktu itu dengan pertemuan budaya Arab, Cina, Pribumi menjadi perpaduan keagungan budaya yang luhur sehingga sebagai pengingat ke generasi yang akan datang.¹¹

Religiusitas sebagai ruhnya, kebudayaan agung itu disekitarnya khususnya *heritage city* berbasis nilai nilai kebudayaan itu bisa menjadi wacana untuk bukan hanya mengedukasi mungkin bisa memberi satu inspirasi masyarakat untuk mengambil nilai nilai kebajikan dan moral dengan penggabungan tentang spritual dan nantinya mempunyai dampak ke pariwisata. sehingga dalam proses pembangunan ruang perkotaan mempunyai tanggung jawab moral bahwa kebudayaan, dan peradapan

¹¹ wawancara, Abdul Qodir (selaku ketua DPRD Gresik)

masa lampau menjadi pijakan masyarakat Gresik. sehingga memberikan penyadaran prosesi spritual dalam perkembangannya memberikan masukan bahwa ini adalah sebuah warisan dari generasi masa lampau dengan beberapa pencampuran arab, china, jawa menjadi modal utama membentuk kontruksi sosial yang kosmopolitan.

Sehingga sejenak kita merenung bahwa masa lampau ini dimaknai dan dihadirkan di masa sekarang justru memiliki nilai nilai yang *visioner* dalam pembangunan yang beragam dan kesadaran kolektif. adanya akulturasi beragam arus budaya besar tidak terjadi *cross*. kebesaran *heritage city* bukan hanya menjadi sumber inspirasi pembangunan akan tetapi sebagai cara untuk menjaga dan merawat sebuah memori yang perlu diwariskan untuk generasi yang akan datang dengan memasukan simbol modernitas hari ini memberikan warna baru terhadap kebudayaan baru tidak berjarak dengan kebudayaan masa lampau dengan kombinasi arus besar modern dan budaya untuk berperan membentuk kesadaran historis sekaligus memberikan apresiasi capaian peninggalan kebudayaan sekaligus mengedukasi masyarakat bisa mengali lebih esensi dan kearifan budaya.

Agenda *Setting* Di Kabupaten Gresik Dalam Perencanaan Pembangunan Saat Persiapan acara dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan pembangunan) untuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam pernyataan Bupati Gresik Gus Yani (Fandi Akhmad Yani) menyatakan akan menghapus ketimpangan dalam wilayah Gresik yang tidak terpusat di beberapa kecamatan saja, untuk melakukan pemerataan dan mendorong pembangunan dari sub pelosok desa sampai ke pusat perkotaan. Peryataan ini dalam pidatonya waktu sambutan di acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di hadapan

undangan peserta yang berlangsung di kantor bupati Gresik Ruang Puteri Cempo hari rabu (23/6/2021)¹².

Melihat waktu acara yang masih dalam kondisi pasca percepatan penguatan dan sinergitas mengingat dalam masa transisi dalam masa pandemi covid-19 peserta undangan yang terbatas hanya di hadiri oleh 17 peserta yang ada dalam ruangan secara langsung, dan peserta yang lainnya menghadiri melalui daring sebanyak 245 orang kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RPJMD kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Peserta yang hadir langsung di lokasi dari jajaran Bupati, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, Sekda kabupaten Gresik Abimanyu Poncoatmojo, Ketua Bappeda (Badan perencanaan Daerah) serta beberapa Kepala OPD Pemerintahan daerah Gresik.

Peserta yang menghadiri secara daring Wakil Bupati Gresik Aminatul, beberapa Anggota Forkopimda (Forum komunikasi Pimpinan Daerah), perwakilan dari kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, perwakilan para Pimpinan Kepala Bappeda dari beberapa wilayah dari Kabupaten Lamongan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Terlebih dari peserta undangan dari beberpa unsur masyarakat dari pimpinan Ketua TP PKK dan Pimpinan Ketua GOW Gresik, serta para Pimpinan dari Kepala OPD Se Kabupaten Gresik serta dari para Pelaku Usaha, LSM, Pers, dari Komunitas Yang terakhir dari Beberapa Pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.

Fokus dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) ditahun ini mempunyai tanggung jawab besar sebagai forum rembuk komunikasi yang bisa diharapkan serta bisa memberikan catatan dan masukan kritis sesuai fakta lapangan berdasarkan persoalan dan permasalahan yang dihadapi untuk kesuksesan serta kelancaran

¹² Musrenbang kabupaten Gresik (kominfo Gresik)

dalam implementasi dari perencanaan pembangunan Gresik. Sehingga pada forum ini semua aspirasi dan masukan ataupun catatan untuk melangkah dan bersinergi bersama untuk pembangunan kabupaten Gresik Seutuhnya. Poin yang perlu di garis bawahi sebagai acuan dan catatan terpenting sebagai upaya untuk mulai menghapus ketimpangan pembangunan beberapa wilayah yang hanya terpusat di kota dan disekitar tengah kota. Untuk mendorong pemerataan yang dimulai dari pelosok desa yang sudah lama tidak tersentuh dalam pembangunan dalam hal itu sudah waktunya berbenah dan mengatasi permasalahan ini secara langsung dengan terus pendampingan dengan nyata. Pernyataan Gus Yani, selaku Bupati Gresik dalam menyampaikannya.

Sesuai dalam visi Bupati Kabupaten Gresik “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” ini sebagai pijakan dan upaya dari bupati Gresik untuk terus mempertimpangkan segala permasalahan dan isu strategis pembangunan yang punya arah dan berskala secara Global, Nasional, maupun di tingkatan Regional. Semua itu hasil dari Telaah terhadap RPJMN (Rancangan Pembangunan jangka Menengah Nasional) dan sesuai arahan dari Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDG’s di analisa dan sebagai kerangka dalam perencanaan Dokumen RPJPD (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah) di kabupaten Gresik 2005-2021, sesuai dengan RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pada tahun 2019-2024, RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2019-2024.

Sehingga dalam hal ini Bupati Kabupaten Gresik dalam merumuskan Rancangan Indikator Kinerja Utama Yaitu:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi dari Acuan 69,4 % persen punya target kedepannya mengalami peningkatan sebesar 88,6 % pada akhir dari periode
- b) RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gresik.
- c) Indeks Inovasi Daerah 3,549 % untuk

target kedepannya sebesar 5,200 % pada akhir Periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik.

- d) Indeks Daya Saing Daerah dari 2,68 % untuk target kedepannya sebesar 3,72% pada akhir periode dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah) Kabupaten Gresik.
- e) Indeks dalam kualitas Lingkungan Hidup dari 74,25 % untuk target kedepannya di targetkan sebesar 81,22 % pada akhir periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gresik.
- f) Indeks dalam Pembangunan Gender dari 90,03 % untuk target kedepannya di targetkan sebesar 93,64 % pada akhir periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gresik.
- g) Indeks Pertumbuhan Ekonomi dari - 3,68 % untuk target kedepannya bisa tumbuh mencapai + 5,5 % pada Akhir Periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik.
- h) Indeks Pembangunan Manusia dari 76,1 % untuk target kedepannya bisa tumbuh mencapai 81,12 % pada Akhir Periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik.
- i) Indeks Kesalehan Sosial dari 74 % untuk target kedepannya bisa tumbuh mencapai 84 % pada Akhir Periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik.
- j) Indeks Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 8,21 % untuk target kedepannya bisa menurun mencapai 5,54 % pada Akhir Periode RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik.
- k) Indeks Terakhir dalam menurunkan Kemiskinan dari 12,4 % untuk target kedepannya bisa menurun pada Kisaran satu digit 9,15-8,50 % pada Akhir Periode RPJMD (Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik.

Dari catatan forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang bersifat Inklusif ini kedepannya akan segera di tuangkan dalam persiapan untuk penyempurnaan Rancangan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gresik pada Tahun 2021-2026 yang nantinya dilanjutkan untuk dibahas dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Gresik. Keterangan yang disampaikan melalui Bagian dari Humas dan Protokol, Kepala Bappeda Gresik Hermanto Sianturi Menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dari RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gresik ini sesuai dan arah dari penjabaran Visi dan Misi dari Bupati Gresik dan untuk melaksanakan kegiatan terkait isu yang dibawa menyesuaikan dengan harapan beliau dalam rancangan 5 tahun kedepan, Sejak beliau dilantik pada 26 Februari 2021.

Meskipun dalam Pelaksanaannya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kali ini yang dilaksanakan secara terbatas dikarena masih dalam protokol kesehatan Pandemi Covid-19 yang terbatas hanya bisa menghadirkan 17 orang peserta di dalam ruangan, namun ini tidak membatasi keterwakilan *Stakeholder* yang hadir langsung secara daring, diluar peserta yang hadir langsung secara Luring, melalui bantuan Teknologi melalui ZOOM dapat menghadirkan undangan yang lain sebanyak 245 peserta sehingga bisa terus menyampaikan aspirasi maupun catatan buat perumusan dalam menyiapkan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik Secara Maksimal tanpa Terkendala apapun¹³.

Kesimpulan

Secara umum kita harus menyiapkan dan melakukan pencegahan yang mengandung persuasi dengan mengajak kita untuk masuk dalam dampak dari penataan kota terutama masyarakat gresik sendiri ketika melihat penjelasan ini melalui skema dan dampak perubahan itu sangat nyata terhadap sosio-kultural dalam melakukan kontemplasi dalam keprihatinan atas masalah yang terjadi dan yang akan datang. Bahwa wilayah dan daerah di kabupaten gresik mengalami perubahan sangat cepat dan nyata sangat baik dan cukup memberikan penggambaran dan penjelasan yang rinci sehingga mempermudah pembaca memahami atas konteks persoalan dan masalahnya dengan sangat dekat.

Kurangnya data secara kuantitatif dalam merumuskan kebijakan dan peraturan sebelum dijadikan aturan atau pembahasan di RPJMD (Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah) di kabupaten Gresik, untuk mempermudah dan punya analisa yang lebih matang tidak hanya *Stakeholders* yang berkepentingan, sedangkan akibat dari kapitalisme industrialisasi ini semua unsur masyarakat punya persepsi dan pendapat. Nantinya diharapkan akan lebih banyak warna dan tidak berat ke kerangka *civil society* ke wilayah negara dan privatisasi pengusaha ataupun yang berkepentingan padahal ini banyak bersangkutan ke wilayah publik. dampak pembangunan kota yang hanya mementingkan industrialisasi hanya dipandang dari kepentingan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat efek dari (*trickle down effect*) secara emosional dan kultural yang merubah masyarakat hanya mesin kerja tidak lebih, semisal persoalan perlindungan sosial, jaminan sosial, jaminan keamanan, jaminan pemberdayaan sosial. memang kita perlu belajar untuk bisa menerima banyak hal, memang kehidupan seperti itu, Realitas hidup bukan untuk di tolak. karena akan

¹³ wawancara, Pers Rilis Diskominfo Kabupaten Gresik

mengingkari akal sehat, namun untuk di perbaiki. Hidup bukan hanya di komentari, tapi untuk diperjuangkan.

Penulis mencoba menjabarkan terlebih dahulu tentang suatu persoalan dalam penataan perkotaan dan lalu mencoba memberi penggambaran yang dikuatkan oleh beberapa penjelasan dengan beberapa fenomena yang terjadi pada masyarakat yang acuh tak acuh dengan perkembangan dan pertumbuhan dari industrialisasi, kemudian barulah menyadari dari dampak dari awal dan perubahannya dari penataan ruang kota yang hanya mementingkan pembangunan industri dengan menawarkan alternatif paradigma pembangunan dengan berbasis budaya.

Atas kurangnya pengkajian dari beberapa stakeholder beberapa pemangku kepentingan tanpa merespon dan meminta pendapat langsung dari respon masyarakat yang terdampak secara langsung akibat industrialisasi dari limbah, pencemaran udara, dan bising ataupun kecelakaan kerja yang sempat merugikan serta berdampak terhadap warga sekitar, Kurangnya data secara kuantitatif untuk mempermudah dan punya analisa yang lebih matang tidak hanya stakeholder yang berkepentingan, sedangkan akibat dari kapitalisme industrialisasi ini semua unsur masyarakat punya persepsi dan pendapat.

Nantinya diharapkan akan lebih banyak warna dan tidak berat ke kerangka *civil society* ke wilayah negara dan privatisasi pengusaha ataupun yang berkepentingan padahal ini banyak bersangkutan ke wilayah publik. dampak pembangunan kota yang hanya mementingkan industrialisasi hanya dipandang dari kepentingan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat efek dari (*trickle down effect*) secara emosional dan kultural yang merubah masyarakat hanya mesin kerja tidak lebih, semisal persoalan perlindungan sosial, jaminan sosial, jaminan keamanan, jaminan pemberdayaan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan tidak hanya dimaknai pembangunan fisik akan tetapi lebih dari itu arah keberlangsungan dan berkelanjutan yang lebih merepresetasikan Gresik sebagai kota wali

dan kota Santri dengan pembangunan kota dengan bagian dari media dakwah islam secara masif di masyarakat.

Daftar Pustaka

- AR. Mustopadidjaya (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- Anderson, James E.1970. *Public Policy Making*, New York: Reinhart and Wiston.
- Bryant dan White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Howlett, michhael, dan M.ramesh (1995) *studyng public policy: policy ciles and policy subsystem*. Oxford: ox- ford university press.
- Lester, james P., dan joseph stewart Jr., (2000). *Public policy: an Evaluation ary Approach*, balmont: wadsworth.
- Noeng, Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: media Elex komputindo.
- Nugroho, Riant (2008) *public policy*. Jakarta : PT Elex me- dia komputindo.
- Palumbo, Dennis J. 1994. *Public Policy In America, Government In Action*, USA: Harcourt Brace & Company.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. 1992. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program) Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Fisipol. UGM Yogyakarta.
- Susanti, Andi Elva, 2012. *Evaluasi Kebijakan Umum Anggaran Daerah yang Responsif Gender Di Dinas*

Kesehatan Kabupaten Mamuju.
Universitas Muhammadiyah
Makassar: Program Studi Ilmu
Pemerintahan.

Weiss, C.H. (1972). *Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness.* Toronto: Englewood Cliff.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses.* Jakarta: PT Buku Kita

Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Galang Gerald, Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Perkotaan di Kabupaten Gresik, Jurnal pemikiran sosiologi UGM Vol. 4, No. 1, 2017, hal 1-17

Wawancara

22 Maret 2022, Pers Rilis Diskominfo Kabupaten Gresik. Wawancara 14 februari 2022, Much Abdul Qodir (selaku ketua DPRD Gresik)